



**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022**

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

JL. GATOT SUBROTO KOMPLEK TARUBUDAYA UNGARAN

TELP. 024-6921972,6925554, FAX. 024-6921997

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, kegiatan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Intern

Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan memperhatikan struktur dan praktik tata kelola organisasi.

Diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam Laporan Rencana Tindak Pengendalian Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan Rencana Tindak Pengendalian ini kami mengucapkan terima kasih.

Kami berharap agar Rencana Tindak Pengendalian ini bermanfaat dan memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan organisasi.

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Ir. DYAH LUKISARI, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19661016 199203 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 2

DAFTAR ISI 3

DAFTAR TABEL 4

DAFTAR GAMBAR 5

DAFTAR DIAGRAM..... 6

BAB I PENDAHULUAN 7

 A. LATAR BELAKANG 7

 B. DASAR HUKUM 7

 C. MAKSUD DAN TUJUAN..... 9

 D. RUANG LINGKUP..... 9

BAB II PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN.....10

 A. LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI.....10

 B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN.....11

BAB III PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN12

 A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN.....12

 B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO14

 C. HASIL ANALISIS RISIKO23

 D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN30

 E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN32

BAB IV RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI.....36

BAB V RANCANGAN PEMANTAUAN41

BAB VI PENUTUP.....45

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kondisi Lingkungan Pengendalian Urusan Pilihan Pemerintah Daerah11

Tabel 1. 2 Kondisi Lingkungan Pengendalian Urusan Pilihan Pemerintah Daerah11

Tabel 3. 1 Hasil Identifikasi Risiko.....15

Tabel 3. 2 Kategori Dampak Risiko Skala 4.....24

Tabel 3. 3 Tingkat Kemungkinan/Probabilitas24

Tabel 3. 4 Kriteria Penerima Risiko25

Tabel 3. 5 Pengendalian Yang Sudah Dilakukan.....30

Tabel 3. 6 Penilaian Atas Kegiatan Yang Ada dan Masih Dibutuhkan33

Tabel 4. 1 Rancangan Informasi dan Komunikasi36

Tabel 5. 1 Rancangan Pemantauan.....41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Perencanaan dan Penganggaran Serta Keterkaitan Antar Dokumen.12

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3. 1 Penilaian Risiko Prioritas29

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu:

1. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. keandalan pelaporan keuangan;
3. pengamanan aset negara; dan
4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan.

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah menyusun Rencana Tindak Pengendalian, sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2022 ini diprioritaskan untuk mencapai kualitas pencapaian tujuan organisasi, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan didukung pengendalian intern yang memadai.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan *Control Self Assessment* untuk Penilaian Risiko;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan *Control Environment Evaluation* (CEE);
8. Peraturan Kepala BPKP Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP bagi Fasilitator BPKP ;
9. Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko;
10. Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tanggal 21 Agustus 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
12. Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/102/1.2/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/1541/1.2/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Jawa Tengah;
13. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 045/0205 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas SPIP Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Rencana Tindak Pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

2. Tujuan

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Penyelenggaraan SPIP ini meliputi pengelolaan risiko strategis pemerintah daerah, risiko strategis OPD, dan risiko kegiatan (operasional) OPD.

BAB II

PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar sistem pengendalian intern dapat terimplementasi secara efektif.

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian intern yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

1. Penegakan integritas dan nilai etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Kepemimpinan yang kondusif;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi.

Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern *Control Environment Evaluation* (CEE) kepada 55 (lima puluh lima) responden menunjukkan hasil semua lingkungan pengendalian memadai. Sedangkan dari reviu dokumen ditemukan masih adanya lingkungan pengendalian yang kurang memadai yaitu Komitmen terhadap kompetensi, dimana belum terdapat pelatihan terkait pengelolaan resiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala. Hanya 1 (satu) orang staff yang mendapat pelatihan, sedangkan masih banyak pengisian kertas kerja format MR yang diisi oleh penanggung jawab kegiatan yang belum sesuai

panduan. Dari hasil penilaian lingkungan pengendalian tersebut selanjutnya divalidasi dan disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan pilihan pada pemerintah daerah, diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Kondisi Lingkungan Pengendalian Urusan Pilihan Pemerintah Daerah

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Kurang Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6	Kebijakan Pengembangan SDM	Memadai
7	Pengawasan Internal yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah	Memadai

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation*, menunjukan ada tiga lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki. Sub Unsur yang masih perlu diperbaiki adalah Komitmen terhadap Kompetensi. Selanjutnya akan dilakukan pengendalian dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1. 2
Kondisi Lingkungan Pengendalian Urusan Pilihan Pemerintah Daerah

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
II	Komitmen terhadap Kompetensi			
1	Rencana kaderisasi staf yang kompeten untuk mendapat pelatihan terkait pengelolaan resiko	Pelatihan oleh pihak ketiga (BPSDMD/ BPKP Prov. Jateng/ Inspektorat) terkait pengelolaan manajemen resiko.	Kepala Dinas/Sekretaris	Tahun 2022

BAB III

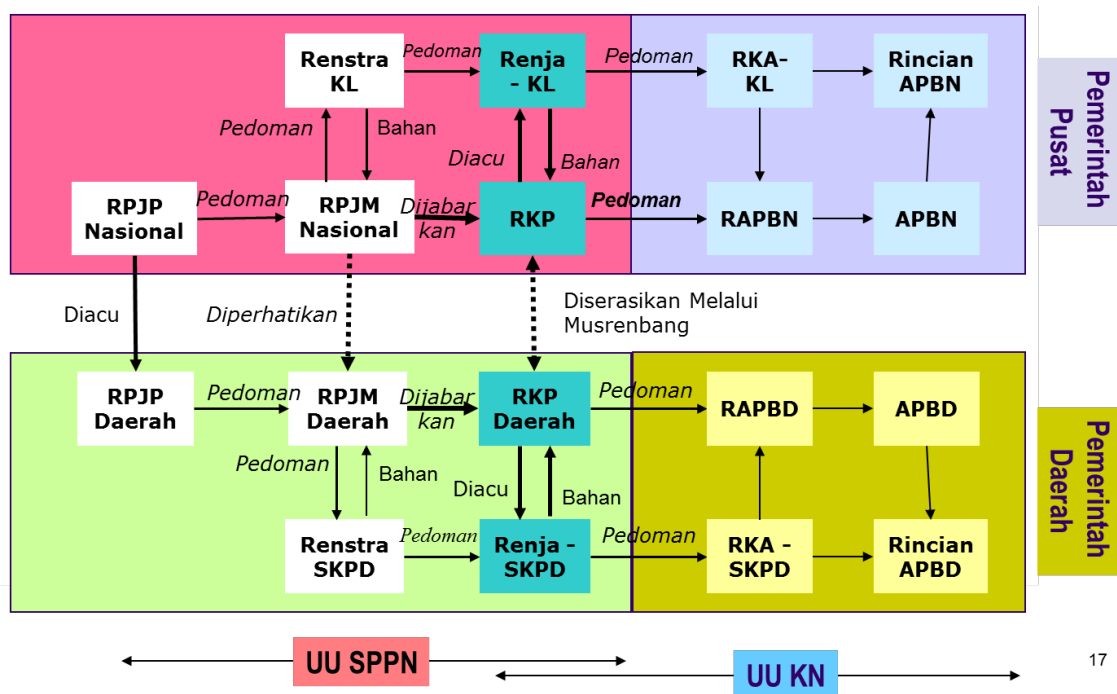
PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN

Dokumen perencanaan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD, sebagai contoh, memuat antara lain tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dan OPD dalam satu masa pemerintahan kepala daerah. Sedangkan tujuan pada tingkatan kegiatan, antara lain tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja OPD (Renja). Oleh karena itu, tujuan pemerintah daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis tujuan, yaitu tujuan strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD, tujuan strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Renstra OPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan/operasional yang tertuang dalam dokumen Renja OPD.

Dalam kerangka perencanaan tersebut harus ada keselarasan antar dokumen sehingga masing-masing tingkatan akan saling mendukung dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Secara rinci keselarasan antar dokumen perencanaan tersebut tertuang dalam gambar berikut :

Gambar 2. 1
Alur Perencanaan dan Penganggaran Serta Keterkaitan Antar Dokumen



Provinsi Jawa Tengah dalam periode Tahun 2018-2023 memiliki Visi dan Misi, serta Program Unggulan yang telah ditetapkan dan tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu :

VISI :

Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera,

“(Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

MISI :

1. Membangun Masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Menjadikan Rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah memiliki kewajiban untuk turut serta mewujudkan Visi dan Misi Jawa Tengah, terutama pada Misi ke-3, yaitu : “Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran”. Tujuan dari Misi ke-3 ini adalah :

1. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah semakin religious, toleran, dan guyup;
2. Tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata;
4. Stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan eksklusif berbasis potensi unggulan;
5. Sumber daya Jawa Tengah yang berkualitas dan berdaya saing;
6. Sumber daya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan.

Peran dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah adalah pada Tujuan ke-4 : Stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan eksklusif berbasis potensi unggulan, dengan program unggulan Menjaga harga komoditas dan asuransi harga panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan.

Mempertimbangkan hal-hal di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah pada Rencana Strategis Tahun 2018-2023, yaitu : **“Meningkatkan Ketahanan Pangan”**. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran, yaitu Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas.

B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

Pengelolaan risiko strategis pemerintah daerah bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintahan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat pemerintah daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Kepala Bappeda, atau OPD yang menangani perencanaan selaku koordinator teknis.

Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD). Sedangkan pengelolaan risiko operasional OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan OPD, seperti; Penetapan Kinerja OPD (Perkin), dan Rencana Kerja OPD (Renja

dan/atau RKPD). Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan dibantu oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

Hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko) diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Hasil Identifikasi Risiko

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Risiko	C/UC	Dampak	Penerima Dampak
I Risiko Strategis Pemerintah Daerah							
1	Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata antar waktu dan antar wilayah	Gubernur	Perbedaan Panen antar waktu dan antar wilayah	Eksternal	UC	1. Akses Pangan Masyarakat Terganggu 2. Harga pangan fluktuatif	Masyarakat
2	Rendahnya kemampuan menyerap hasil panen petani	Gubernur	Belum ada lembaga usaha yang menyerap panen secara optimal	Eksternal	UC	Harga pangan jatuh di tingkat petani	Masyarakat (Produsen)
3	Data tidak realtime	Gubernur	Belum ada lembaga yang ditunjuk sebagai operator SISLOGDA di Provinsi Jawa Tengah	Internal	C	Terhambatnya pelayanan kepada masyarakat	Masyarakat (Produsen, konsumen), stakeholders dalam SISLOGDA
4	Tingginya ketergantungan konsumsi masyarakat terhadap padi-padian	Gubernur	Preferensi masyarakat terhadap pangan lokal masih rendah	Masyarakat Jawa Tengah	UC	Komoditas pangan lokal tidak berkembang secara optimal baik pada sisi budidaya maupun sisi bisnis olahan	Masyarakat (petani, pelaku usaha olahan, konsumen)
II Risiko Strategis Perangkat Daerah							
1	Ketercapaian nilai komposisi pola pangan belum ideal pada seluruh kelompok pangan	Kepala Dinas	Rendahnya konsumsi kelompok pangan hewani, kacang-kacangan dan umbi-umbian	Eksternal	UC	Konsumsi Pangan didominasi kelompok padi-padian	Masyarakat Jawa Tengah
2	Rendahnya angka konsumsi energi Jawa Tengah	Kepala Dinas	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsumsi yang B2SA	Eksternal	UC	Kecukupan energi di masyarakat tidak terpenuhi	Masyarakat Jawa Tengah
3	Ketersediaan energi tidak beragam, masih didominasi oleh satu kelompok jenis pangan tertentu	Kepala Dinas	Kurangnya data dan informasi mengenai ketersediaan kelompok pangan lain	Eksternal	UC	Tidak tercapainya ketersediaan energi pangan yang beragam	Masyarakat Jawa Tengah
4	Tidak terdistribusikannya bahan pangan dari produsen kepada konsumen	Kepala Dinas	Panjangnya rantai distribusi pangan	Eksternal	C/UC	Disparitas harga antara konsumen dan produsen	Masyarakat Jawa Tengah
5	Cadangan pangan tidak tersedia	Kepala Dinas	Keterbatasan anggaran pemerintah untuk penyediaan cadangan pangan	Internal	C	Tidak tertanganinya rawan pangan	Masyarakat Jawa Tengah
6	Angka konsumsi kelompok pangan padi-padian melebihi dari nilai konsumsi ideal	Kepala Dinas	Kurangnya edukasi pangan B2SA	Eksternal	UC	Diversifikasi pangan lokal belum dapat berkembang secara optimal	Masyarakat Jawa Tengah
			Rendahnya preferensi masyarakat terhadap pangan lokal	Eksternal	UC	Diversifikasi pangan lokal belum dapat berkembang secara optimal	Masyarakat Jawa Tengah

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Risiko	C/UC	Dampak	Penerima Dampak
			Minimnya referensi olahan pangan lokal di masyarakat	Eksternal	UC	Diversifikasi pangan lokal belum dapat berkembang secara optimal	Masyarakat Jawa Tengah
			Harga pangan lokal belum dapat bersaing dengan harga pangan strategis	Eksternal	UC	Diversifikasi pangan lokal belum dapat berkembang secara optimal	Masyarakat Jawa Tengah
7	PSAT mengandung cemaran	Kepala Dinas	Kurangnya pengawasan, kurangnya pemahaman pelaku usaha PSAT terhadap mutu pangan, kurangnya sosialisasi pada pelaku usaha	Internal, Eksternal	C/UC	Kesehatan masyarakat terganggu	Masyarakat Jawa Tengah
8	Kualitas PSAT yang beredar masih buruk	Kepala Dinas	Kurangnya pengawasan, kurangnya pemahaman pelaku usaha PSAT terhadap mutu pangan, kurangnya sosialisasi pada pelaku usaha	Internal, Eksternal	C/UC	Kesehatan masyarakat terganggu	Masyarakat Jawa Tengah
9	Proses penanganan PSAT tidak sesuai standar	Kepala Dinas	Kurangnya pengawasan, kurangnya pemahaman pelaku usaha PSAT terhadap mutu pangan, kurangnya sosialisasi pada pelaku usaha	Internal, Eksternal	C/UC	Kesehatan masyarakat terganggu	Masyarakat Jawa Tengah
10	PSAT belum memiliki izin edar / nomor registrasi	Kepala Dinas	Kurangnya pengawasan, kurangnya pemahaman pelaku usaha PSAT terhadap keamanan pangan, kurangnya sosialisasi pada pelaku usaha	Internal, Eksternal	C/UC	Kesehatan masyarakat terganggu	Masyarakat Jawa Tengah
11	Masyarakat mengkonsumsi pangan yang belum aman	Kepala Dinas	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi PSAT yang aman dan bermutu, kurangnya edukasi pangan aman dan bermutu ke masyarakat	Eksternal, Internal	C/UC	Kesehatan masyarakat terganggu	Masyarakat Jawa Tengah
12	Belum maksimalnya rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan	Kepala Dinas	Kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap jaminan mutu dan keamanan pangan	Internal dan Eksternal	C/UC	Kesehatan masyarakat tertanggu	Masyarakat Jawa Tengah
13	Belum optimalnya intervensi pada daerah rawan pangan	Kepala Dinas	Pemilihan stimulan untuk penanganan daerah rawan pangan	Internal	UC	Pendapatan per kapita rendah	Masyarakat Jawa Tengah
III Risiko Operasional Perangkat Daerah							
1	Data komoditas pangan strategis yang dihasilkan kurang akurat	Kepala Dinas	Data yang diterima dari Dinas teknis terkait dan Instansi Pangan Kabupaten Kota belum lengkap	Eksternal	C	Rekomendasi kurang tepat	Instansi Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota
	Data harga pangan strategis kurang akurat	Ka. Distribusi Cadangan Pangan	Keterlambatan dalam pemantauan di lapangan, ketelitian dalam input data	Eksternal	C	Data tidak dapat dimanfaatkan untuk analisis dan bahan pengambilan kebijakan	OPD

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Risiko	C/UC	Dampak	Penerima Dampak
	Belum optimalnya intervensi harga pangan strategis	Ka. Bid. Distribusi dan Cadangan Pangan	Keterbatasan anggaran	Eksternal	UC	Harga masih fluktuatif di beberapa daerah	Masyarakat
2	Potensi pengembangan pangan lokal potensi daerah tidak optimal	Ka. Bid. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Pangan lokal kurang diminati oleh sebagian besar masyarakat	Eksternal	UC	1. Pemanfaatan pangan lokal tidak optimal 2. Upaya diversifikasi pangan sulit tercapai	Masyarakat / OPD
3	Aplikasi SISLOGDA error, belum running well	Ka. Bid. Distribusi dan Cadangan Pangan	Sistem dalam perbaikan	Eksternal	UC	Data tidak menggambarkan kondisi distribusi dan logistik pangan Provinsi Jawa Tengah secara utuh, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan	Masyarakat
	Tidak terserapnya produk petani	Ka. Bid. Distribusi dan Cadangan Pangan	Tidak ada pembeli / pasar yang menyerap produk petani	Eksternal	UC	Produsen mengalami kerugian	Produsen
	TTIC tidak dapat bersaing dengan pasar lainnya	Ka. Bid Distribusi dan Cadangan Pangan	Lokasi tidak strategis, keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana TTIC belum memadai	Eksternal dan Internal	C	TTIC tidak dapat beroperasi secara optimal	OPD dan masyarakat
4	Unit usaha distribusi pangan (sistem tunda jual) tidak berjalan	Ka. Bid. Distribusi dan Cadangan Pangan	Kurangnya pengetahuan dan keterampilan SDM dalam menjalankan usaha distribusi pangan; Kurangnya sarpras pendukung usaha distribusi pangan	Eksternal	UC	Usaha gapoktan tidak berkembang	Masyarakat
5	Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola di bawah standar ketentuan yang berlaku	Ka. Bid Distribusi dan Cadangan Pangan	Keterbatasan anggaran dan sarpras, kurangnya pengawasan	Eksternal dan Internal	UC/C	Belum dapat mengintervensi seluruh kondisi rawan pangan transien di Jawa Tengah	Masyarakat
	Tidak ada cadangan pangan di Lumbung Pangan Masyarakat	Ka. Bid Distribusi dan Cadangan Pangan	Keterbatasan anggaran, SDM, dan sarpras	Eksternal	UC	Tidak tertanganinya rawan pangan secara mandiri	Masyarakat
6	Data dan informasi terkait potensi pangan lokal Jawa Tengah tidak akurat	Bidang KKP	Tidak ada tim Pokja pengembangan pangan lokal yang melibatkan lintas OPD Provinsi dan OPD tingkat Kabupaten/Kota yang mengampu urusan pangan	Eksternal	UC	Pengambilan keputusan yang kurang tepat	Dishanpan
	Agenda intervensi pengembangan pangan lokal tidak efektif	Bidang KKP	Relevansi antara strategi intervensi pengembangan pangan lokal dengan kondisi di lapangan masih rendah	Internal	UC	Intervensi pengembangan pangan lokal belum optimal	Masyarakat Jawa Tengah

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Risiko	C/UC	Dampak	Penerima Dampak
	Keterjangkauan penyebaran informasi B2SA rendah	Bidang KKP	Minimnya pemanfaatan media dalam pelaksanaan edukasi dan promosi B2SA dan pangan lokal	Internal	C	Penyebaran informasi melalui promosi dan edukasi B2SA belum efektif	Masyarakat Jawa Tengah
	Agenda Edukasi B2SA tidak efektif	Bidang KKP	Sinergi agenda intervensi terhadap permasalahan stunting masih rendah	Internal	UC	Angka stunting di Jawa Tengah diatas standar WHO	Masyarakat Jawa Tengah
	Bantuan OPP tidak efektif	Bidang KKP	Belum adanya model kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan berdasarkan kesesuaian komoditas serta klimatologi masing-masing daerah	Internal	UC	Produktivitas OPP rendah	Masyarakat Jawa Tengah
	Kegiatan OPP tidak berkelanjutan	Bidang KKP	Penerima tidak memiliki dana operasional dalam menjalankan bantuan OPP	Eksternal	UC	Pola konsumsi masyarakat tidak mengalami perbaikan	Masyarakat Jawa Tengah
7	Hasil kajian belum menggambarkan / mewakili kondisi keamanan pangan di Jawa Tengah	Ka. Bid. Keamanan Pangan	Keterbatasan jumlah pengawas, keterbatasan anggaran pengawasan dan pengujian	Internal	C	PSAT yang beredar di Jawa Tengah belum aman	Masyarakat
	Terbatasnya jumlah sampel PSAT yang diuji	Ka. Bid. Keamanan Pangan	Keterbatasan anggaran Pengujian dan Pengawasan	Internal	C	PSAT yang beredar di Jawa Tengah belum aman	Masyarakat
	Metode pengambilan sampel tidak tepat	Ka. Bid. Keamanan Pangan	Petugas pengambil sampel tidak kompeten	Internal	C	PSAT yang beredar di Jawa Tengah belum aman	Masyarakat
	Masyarakat tidak memahami keamanan dan mutu pangan, kemampuan masyarakat beragam	Ka. Bid. Keamanan Pangan	Petugas dan narasumber tidak kompeten	Internal, eksternal	C/UC	Masyarakat mengkonsumsi pangan yang tidak aman dan bermutu	Masyarakat
8	Kelompok / pelaku usaha tidak menerapkan higiene sanitasi	Ka. Bid. Keamanan Pangan	Pelaku usaha tidak memahami higiene sanitasi, keterbatasan petugas	Internal, eksternal	C/UC	PSAT yang beredar tercemar	Masyarakat
9	Keterbatasan layanan pengujian mutu pangan	Ka. BPMKP	Keterbatasan ruang lingkup akreditasi pengujian, SDM, dan sarana prasarana laboratorium	Internal	C/UC	Pelayanan pengujian belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Laboratorium Pengujian Mutu Pangan	Masyarakat / Konsumen
	Keterbatasan sarana dan prasarana pengujian mutu pangan	Ka. BPMKP	Belum dianggarkannya fasilitasi sarana dan prasarana laboratorium BPMKP sampai tahun 2022 (anggaran diusulkan tahun 2023)	Internal	C/UC	Tidak optimalnya Laboratorium uji mutu dan keamanan pangan	Masyarakat / Konsumen
10	Keterbatasan layanan sertifikasi dan registrasi	Ka. BPMKP	Kurangnya kapasitas SDM yang kompeten / penataan personil	Internal	C/UC	Belum optimalnya layanan registrasi dan Sertifikasi PSAT	Masyarakat / Konsumen

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Risiko	C/UC	Dampak	Penerima Dampak
11	Fasilitasi penanganan pada daerah rawan pangan belum optimal	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Kurang tepatnya pemilihan komoditas stimulan dan Penerima fasilitasi stimulan tidak mampu mengelola bantuan stimulan	Internal	UC	Fasilitasi penanganan daerah rawan pangan mengalami stagnan	Masyarakat Jawa Tengah
	Data dasar Peta SKPG dan/atau FSVA yang dihasilkan kurang akurat	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Data yang diterima dari Dinas teknis terkait dan Instansi yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota belum lengkap	Eksternal	UC	Terlambatnya penyusunan laporan Peta SKPG dan/atau FSVA	Instansi Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota
IV Risiko Penunjang Perangkat Daerah							
1	Tidak akuratnya penyajian data awal	Kepala Sub Bagian Keuangan	Data yang disampaikan tidak akurat	Internal	C	Penyediaan gaji dan tunjangan tidak tepat waktu	Dinas Ketahanan Pangan
	Tidak terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Kepala Sub Bagian Keuangan	Data yang disampaikan tidak akurat dan sering terjadi perubahan	Internal	C	Menurunnya kinerja pelaksana kegiatan	Dinas Ketahanan Pangan
	Tidak akuratnya penyajian data awal penyusunan laporan dan verifikasi keuangan	Kepala Sub Bagian Keuangan	Data yang disampaikan tidak akurat	Internal	C	Penyajian laporan yang kurang akuntabel	Dinas Ketahanan Pangan
2	Ketidaksesuaian rincian RAB dengan pilihan indikator kegiatan/sub kegiatan	Kepala Sub Bagian Program	Waktu penginputan aplikasi penganggaran terbatas/singkat	Eksternal	UC	Beberapa kegiatan/sub kegiatan perlu disesuaikan kembali pada anggaran perubahan	Dinas Ketahanan Pangan
	Tidak semua RAB barang/jasa yang dibutuhkan ada di eSHB	Kepala Sub Bagian Program	Terbatasnya barang/jasa dan speknya yang terdapat pada eSHB	Eksternal	C	Beberapa barang/jasa terpaksa harus menyesuaikan spek yang ada di eSHB	Dinas Ketahanan Pangan
	Tidak tercapainya salah satu atau beberapa indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan	Kepala Sub Bagian Program	Kekurangcermatan/pertimbangan dalam penentuan target	Internal	C	Nilai SAKIP OPD menurun	Dinas Ketahanan Pangan
3	1. Terjadinya kerusakan jaringan listrik dan komponen listrik 2. Kabel listrik dimakan tikus	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dishanpan & BPMKP	1. Kondisi jaringan kelistrikan putus 2. Kabel-kabel listrik banyak yang berserakan di lantai	Internal	C	1. Aktivitas kantor menjadi terhambat, pekerjaan terbengkalai/terjadi keterlambatan 2. Dapat menyebabkan kebakaran	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
	Terhambatnya kegiatan kantor	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Perlengkapan kantor sudah tidak tercukupi/tidak memadai dengan kegiatan organisasi	Internal	C	Terjadinya kekurangan peralatan saat kegiatan berlangsung/tidak tercukupinya perlengkapan kantor	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Risiko	C/UC	Dampak	Penerima Dampak
	Terhambatnya pekerjaan kantor	Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPMKP	Peralatan dan perlengkapan kantor sudah tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan organisasi	Internal	C	Terjadinya kekurangan peralatan dan perlengkapan kantor untuk di gunakan dalam kegiatan kantor sehari-hari	BPMKP Dishanpan Provinsi Jawa Tengah
	Dalam pelaksanaan kegiatan kantor menjadi tidak nyaman	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dishanpan & BPMKP	Alat rumah tangga tidak tersedia	Internal	C	Ruangan dan lingkungan kantor menjadi tidak terawat	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
	Tamu yang datang dengan konfirmasi waktu yang terbatas tidak dapat ter spj konsumsinya	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dishanpan & BPMKP	Penyedia jasa konsumsi di aplikasi e-Blangkon tidak segera merespon pesanan	Internal	C	Banyak waktu yang diperlukan untuk mencari penyedia yang cepat merespon pesanan di hari dan waktu yang segera	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
	Kehadiran peserta rapat koordinasi terhambat dan kurang maksimal	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggaran belum tersedia	Internal	C	Tidak adanya koordinasi	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
	Tertundanya keputusan rapat	Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPMKP	Adanya aturan social distancing akibat tingginya kasus Covid-19	Internal	C	Tidak terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BPMKP Dishanpan Provinsi Jawa Tengah
	1. Arsip dimakan rayap 2. Tulisan pada arsip hilang/luntur	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Tidak adanya tempat penyimpanan khusus untuk arsip-arsip 2. Tinta yang digunakan kurang baik	Internal	UC	Saat membutuhkan arsip-arsip menjadi sulit mencarinya	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
	Gangguan eksternal dari penyedia jaringan internet	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Adanya kendala jaringan internet	Eksternal	UC	Tidak terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
	Sarpras pencetak tidak berfungsi maksimal	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sarpras kurang perawatan	Internal	C	Pendistribusian barang cetakan terhambat	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
	Ruangan dan lingkungan kantor tidak terawat	Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPMKP	Alat rumah tangga tidak tersedia	Internal	C	Dalam pelaksanaan kegiatan kantor menjadi tidak nyaman	BPMKP Dishanpan Provinsi Jawa Tengah

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Risiko	C/UC	Dampak	Penerima Dampak
	Terlambatnya penyediaan informasi tentang Dinas Ketahanan Pangan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Masih mengandalkan informasi dari bahan bacaan cetak 2. Website Dishanpan lambat dalam mengupdate informasi 3. Belum memiliki akun resmi Youtube	Internal	UC	Informasi untuk masyarakat tidak terupdate dengan baik	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
4	Distribusi surat menyurat masih membutuhkan waktu yang lama	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Masih menggunakan jasa pengirim surat untuk mendistribusikan surat-surat dinas	Eksternal	UC	Informasi tidak tersampaikan dan menghambat pekerjaan	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
	Terjadinya kenaikan tarif penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Biaya operasional pihak penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik tinggi	Eksternal	C	Terhambatnya pekerjaan yang menggunakan sumber daya air dan listrik sehingga akan menurunkan kinerja petugas dan akan berdampak pada menurunnya pelayanan publik	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
	Honor pegawai kontrak tidak dapat disesuaikan dengan kinerja	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	SK pegawai kontrak ditetapkan setiap tahun dengan angka yang tetap disetiap bulannya	Internal	C	Kinerja pegawai kontrak tidak terukur kompetensinya	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
	Terjadinya tindak kriminalitas dan kebersihan lingkungan terbengkalai	Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPMKP	Tidak adanya petugas penjagaan dan kebersihan lingkungan	Internal	C	Banyak barang kantor yang hilang dan tidak terawat	BPMKP Dishanpan Provinsi Jawa Tengah
5	Kinerja JFT (Jabatan Fungsional Tertentu) penyetaraan harus mengimbangi kinerja JFT murni	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Adanya peraturan perundang-undangan terbaru terkait penyetaraan jabatan struktural dan fungsional	Internal	UC	JFT penyetaraan kesulitan mengimbangi kinerja JFT murni	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
	Tidak semua aparatur mengikuti kegiatan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Adanya kegiatan lain yang bersamaan dengan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan tidak optimal	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
6	Tingginya risiko kerusakan dan kehilangan Barang Milik Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Klaim yang ditolak oleh pihak penjamin (asuransi)	Internal	C	Barang Milik Daerah yang rusak/hilang tidak bisa diperbaiki atau diganti dengan yang baru	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
	Tanah tidak dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tupoksi	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Letak tanah jauh dari jangkauan OPD	Internal	C	Tanah mangkrak dikuasai pihak lain	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Risiko	C/UC	Dampak	Penerima Dampak
7	Gedung rusak dan membahayakan bagi pengguna dan pegawai	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Tidak dilakukan pemeliharaan rutin secara optimal	Eksternal	C	Mengganggu dan menghambat aktivitas pekerjaan kantor	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
	Kerusakan gedung semakin parah dan gedung tidak dapat digunakan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPMKP	Gedung kantor tidak dilakukan pemeliharaan rutin	Internal	C	Gedung kantor yang sudah tua usianya dan rusak membahayakan pegawai	BPMKP Dishanpan Provinsi Jawa Tengah
	1. Pekerjaan terhambat karena komputer terkena virus 2. Tidak terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Komputer digunakan oleh banyak orang 2. Terlambat pelaksanaannya	Internal	C	Menghambat pelaksanaan kegiatan	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
	Pekerjaan kantor terhambat karena sarana dan prasarana kantor banyak yang rusak dan tidak terawat	Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPMKP	Anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor tidak tersedia dengan cukup	Internal	C	Menghambat pelaksanaan kegiatan	BPMKP Dishanpan Provinsi Jawa Tengah
	Kendaraan banyak yang tidak layak jalan untuk operasional kegiatan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Perawatan tidak dilakukan termasuk tidak terbayarnya pajak kendaraan	Internal	C	Kendaraan operasional dinas tidak dapat digunakan untuk menunjang kegiatan dinas	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

C. HASIL ANALISIS RISIKO

Penetapan struktur analisis risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah (*Stakeholders*) mengenai aspek-aspek pengelolaan risiko, yang antara lain meliputi:

- a. Sumber risiko, berasal dari internal dan eksternal.
- b. Dampak risiko, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa/kejadian yang menghambat pencapaian tujuan terjadi.
- c. Pihak yang terkena dampak, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan pencapaian tujuan.

Kemudian dilakukan penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah (*Stakeholders*) mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) atau tingkat risiko yang dapat ditoleransi (*tolerable risk*) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*) dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

Rumusan kriteria tersebut, ditetapkan oleh pihak manajemen sesuai dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan. Setelah itu, dilakukan penilaian risiko terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko, kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko dan skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*).

Dalam penyusunan RTP ini tim menggunakan skala dampak dalam skala 4, contoh kategori dampak risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Kategori Dampak Risiko Skala 4

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Sangat signifikan / Sangat besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan.
Signifikan / Besar	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan.
Kurang signifikan/ Kecil	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan.
Tidak signifikan/ Sangat kecil	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan.

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. Untuk skala probabilitas, tim penyusun menggunakan kriteria penilaian skala 4, dengan ilustrasi sebagai berikut :

Tabel 3. 3
Tingkat Kemungkinan/Probabilitas

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Hampir pasti terjadi/ Sangat sering	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70%, atau lebih dari 7 kali dalam 10 Tahun)
Kemungkinan besar/ Sering terjadi	3	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 41 – 70% atau 4 sd 7 kali dalam 10 tahun),
Kemungkinan kecil/ Jarang	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11% – 40% atau 1 sd 4 kali dalam 10 tahun
Sangat jarang	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 – 10%) atau 1 kali dalam 10 tahun

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*). Dalam menentukan skala risiko penulis menggunakan nilai skala 4 dengan ilustrasi sebagai berikut :

Tabel 3. 4
Kriteria Penerima Risiko

Skala Nilai Risiko	Kategori	Penerimaan Risiko	Tindakan
1 – 4	Rendah	Dapat diterima	Tidak diperlukan tindakan
4,01 – 8	Sedang	Diperlukan pengendalian yang lebih baik	disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya
8,01 – 12	Tinggi	Harus menjadi perhatian managemen	diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
12,01 – 16	Sangat Tinggi	Tidak dapat diterima	diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko

No	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis Pemerintah Daerah				
1	Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata antar waktu dan antar wilayah	RSP.22.09.13.01	3	4	12
2	Rendahnya kemampuan menyerap hasil panen petani	RSP.22.09.13.02	3	3	9
3	Data tidak realtime	RSP.22.09.13.03	3	4	12
4	Tingginya ketergantungan konsumsi masyarakat terhadap padi-padian	RSP.22.09.13.04	3	4	12
II	Risiko Strategis Perangkat Daerah				
1	Tidak terdistribusikannya bahan pangan dari produsen kepada konsumen	RSO.22.09.13.01	3	3	9
2	Cadangan pangan tidak tersedia	RSO.22.09.13.02	4	2	8
3	Ketercapaian nilai komposisi pola pangan belum ideal pada seluruh kelompok pangan	RSO.22.09.13.03	3	3	9
4	Rendahnya angka konsumsi energi Jawa Tengah	RSO.22.09.13.04	3	3	9
5	Keterjangkauan penyebaran informasi B2SA rendah	RSO.22.09.13.05	3	3	9
6	PSAT mengandung cemaran	RSO.22.09.13.06	3	2	6
7	Kualitas PSAT yang beredar masih buruk	RSO.22.09.13.07	3	3	9
8	Proses penanganan PSAT tidak	RSO.22.09.13.08	2	3	6

No	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
	sesuai standar				
9	PSAT belum memiliki izin edar / nomor registrasi	RSO.22.09.13.09	3	3	9
10	Masyarakat mengkonsumsi pangan yang belum aman	RSO.22.09.13.10	3	2	6
11	Belum optimalnya intervensi pada daerah rawan pangan	RSO.22.09.13.11	2	2	4
III Risiko Operasional Perangkat Daerah					
1	Data komoditas pangan strategis yang dihasilkan kurang akurat	ROO.22.09.13.01	3	2	6
	Data harga pangan strategis kurang akurat	ROO.22.09.13.02	3	3	9
	Belum optimalnya intervensi harga pangan strategis	ROO.22.09.13.03	2	4	8
2	Potensi pengembangan pangan lokal potensi daerah tidak optimal	ROO.22.09.13.04	2	2	4
3	Aplikasi SISLOGDA error, belum running well	ROO.22.09.13.05	3	3	9
	Tidak terserapnya produk petani	ROO.22.09.13.06	2	3	6
	TTIC tidak dapat bersaing dengan pasar lainnya	ROO.22.09.13.07	2	3	6
4	Unit usaha distribusi pangan (sistem tunda jual) tidak berjalan	ROO.22.09.13.08	2	3	6
5	Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola di bawah standar ketentuan yang berlaku	ROO.22.09.13.09	4	4	16
	Tidak ada cadangan pangan di Lumbung Pangan Masyarakat	ROO.22.09.13.10	4	2	8
6	Data dan Informasi terkait potensi pangan lokal Jawa Tengah tidak akurat	ROO.22.09.13.11	3	2	6
	Agenda intervensi pengembangan pangan lokal tidak efektif	ROO.22.09.13.12	3	3	9
	Keterjangkauan penyebaran informasi B2SA rendah	ROO.22.09.13.13	2	3	6
	Agenda Edukasi B2SA tidak efektif	ROO.22.09.13.14	3	3	9
7	Bantuan OPP tidak efektif	ROO.22.09.13.15	3	3	9
	Kegiatan OPP tidak berkelanjutan	ROO.22.09.13.16	3	2	6
8	Hasil kajian belum menggambarkan/mewakili	ROO.22.09.13.17	2	2	4

No	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
	kondisi keamanan pangan di Jawa Tengah				
	Terbatasnya jumlah sampel PSAT yang diuji	ROO.22.09.13.18	3	2	6
	Metode pengambilan sampel tidak tepat	ROO.22.09.13.19	3	2	6
	Masyarakat tidak memahami keamanan dan mutu pangan, kemampuan masyarakat beragam	ROO.22.09.13.20	3	2	6
9	Kelompok / Pelaku usaha tidak menerapkan higiene sanitasi	ROO.22.09.13.21	3	3	9
10	Keterbatasan layanan pengujian mutu pangan	ROO.22.09.13.22	3	3	9
	Keterbatasan sarana dan prasarana pengujian mutu pangan	ROO.22.09.13.23	3	3	9
11	Keterbatasan layanan sertifikasi dan registrasi	ROO.22.09.13.24	3	3	9
12	Fasilitasi penanganan pada daerah rawan pangan belum optimal	ROO.22.09.13.25	2	2	4
	Data dasar peta SKPG dan/atau FSVA yang dihasilkan kurang akurat	ROO.22.09.13.26	3	2	6
IV Risiko Penunjang Perangkat Daerah					
1	Tidak akuratnya penyajian data awal	RPO.22.09.13.01	3	2	6
	Tidak terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	RPO.22.09.13.02	3	2	6
	Tidak akuratnya penyajian data awal penyusunan laporan dan verifikasi keuangan	RPO.22.09.13.03	3	2	6
2	Ketidaksesuaian rincian RAB dengan pilihan indikator kegiatan/sub kegiatan	RPO.22.09.13.04	2	3	6
	Tidak semua RAB barang/jasa yang dibutuhkan ada di eSHB	RPO.22.09.13.05	2	3	6
	Tidak tercapainya salah satu atau beberapa indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan	RPO.22.09.13.06	2	3	6
3	1. Terjadinya kerusakan jaringan listrik dan komponen listrik 2. Kabel listrik dimakan tikus	RPO.22.09.13.07	3	2	6

No	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
	Terhambatnya kegiatan kantor	RPO.22.09.13.08	2	2	4
	Terhambatnya pekerjaan kantor	RPO.22.09.13.09	3	3	9
	Dalam pelaksanaan kegiatan kantor menjadi tidak nyaman	RPO.22.09.13.10	2	3	6
	Tamu yang datang dengan konfirmasi waktu yang terbatas tidakdapat ter spj konsumsinya	RPO.22.09.13.11	2	3	6
	Kehadiran peserta rapat koordinasi terhambat dan kurang maksimal	RPO.22.09.13.12	2	3	6
	Tertundanya keputusan rapat	RPO.22.09.13.13	2	3	6
	1. Arsip dimakan rayap 2. Tulisan pada arsip hilang/luntur	RPO.22.09.13.14	2	3	6
	Gangguan eksternal dari penyedia jaringan internet	RPO.22.09.13.15	2	3	6
	Sarpras pencetak tidak berfungsi maksimal	RPO.22.09.13.16	2	2	4
	Ruangan dan lingkungan kantor tidak terawat	RPO.22.09.13.17	2	3	6
	Terlambatnya penyediaan informasi tentang Dinas Ketahanan Pangan	RPO.22.09.13.18	2	3	6
4	Distribusi surat menyurat masih membutuhkan waktu yang lama	RPO.22.09.13.19	2	3	6
	Terjadinya kenaikan tarif penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	RPO.22.09.13.20	3	3	9
	Honor pegawai kontrak tidak dapat disesuaikan dengan kinerja	RPO.22.09.13.21	2	2	4
	Terjadinya tindak kriminalitas dan kebersihan lingkungan terbelongkai	RPO.22.09.13.22	3	3	9
5	Kinerja JFT (Jabatan Fungsional Tertentu) penyetaraan harus mengimbangi kinerja JFT murni	RPO.22.09.13.23	2	3	6
	Tidak semua aparatur mengikuti kegiatan	RPO.22.09.13.24	2	2	4
6	Tingginya risiko kerusakan dan kehilangan Barang Milik Daerah	RPO.22.09.13.25	2	2	4
	Tanah tidak dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tupoksi	RPO.22.09.13.26	2	2	4
7	Gedung rusak dan membahayakan bagi pengguna	RPO.22.09.13.27	2	2	4

No	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
	dan pegawai				
	Kerusakan gedung semakin parah dan gedung tidak dapat digunakan	RPO.22.09.13.28	3	3	9
	1. Pekerjaan terhambat karena komputer terkena virus 2. Tidak terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor	RPO.22.09.13.29	2	3	6
	Pekerjaan kantor terhambat karena sarana dan prasarana kantor banyak yang rusak dan tidak terawat	RPO.22.09.13.30	2	3	6
	Kendaraan banyak yang tidak layak jalan untuk operasional kegiatan	RPO.22.09.13.31	2	2	4

Penentuan risiko prioritas dan *acceptable/unacceptable risk*, digunakan diagram risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko serta kriteria level risiko/*risk appetite* yang telah ditentukan. Diagram risiko dapat dibuat skala 4, dengan ilustrasi sebagai berikut :

Diagram 3. 1
Penilaian Risiko Prioritas

Matriks Analisis Risiko			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak signifikan	Kecil	Besar	Sangat Signifikan
			1	2	3	4
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir Pasti	4		ROO.22.09.13.03	RSP.22.09.13.01 RSP.22.09.13.03 RSP.22.09.13.04	ROO.22.09.13.09
	Kemungkinan besar	3		ROO.22.09.13.07	RSP.22.09.13.02	
				ROO.22.09.13.08	RSO.22.09.13.01	
				ROO.22.09.13.13	RSO.22.09.13.03	
				RPO.22.09.13.04	RSO.22.09.13.04	
				RPO.22.09.13.05	RSO.22.09.13.05	
				RPO.22.09.13.06	RSO.22.09.13.07	
				RPO.22.09.13.10	RSO.22.09.13.09	
				RPO.22.09.13.11	ROO.22.09.13.02	
				RPO.22.09.13.12	ROO.22.09.13.05	
				RPO.22.09.13.13	ROO.22.09.13.12	
				RPO.22.09.13.14	ROO.22.09.13.14	
				RPO.22.09.13.15	ROO.22.09.13.15	
				RPO.22.09.13.17	ROO.22.09.13.21	
				RPO.22.09.13.18	ROO.22.09.13.22	
				RPO.22.09.13.19	ROO.22.09.13.23	
				RPO.22.09.13.23	ROO.22.09.13.24	
				RPO.22.09.13.29	RPO.22.09.13.09	
				RPO.22.09.13.30	RPO.22.09.13.20	
					RPO.22.09.13.22	
					RPO.22.09.13.28	
	Kemungkinan kecil	2		RSO.22.09.13.11 ROO.22.09.13.17 ROO.22.09.13.25 RPO.22.09.13.08	RSO.22.09.13.06 RSO.22.09.13.08 RSO.22.09.13.10 ROO.22.09.13.01	RSO.22.09.13.02 ROO.22.09.13.10

				RPO.22.09.13.16 RPO.22.09.13.21 RPO.22.09.13.24 RPO.22.09.13.25 RPO.22.09.13.26 RPO.22.09.13.27 RPO.22.09.13.31	ROO.22.09.13.04 ROO.22.09.13.11 ROO.22.09.13.16 ROO.22.09.13.18 ROO.22.09.13.19 ROO.22.09.13.20 ROO.22.09.13.26 RPO.22.09.13.01 RPO.22.09.13.02 RPO.22.09.13.03 RPO.22.09.13.07	
	Sangat jarang	1				

Keterangan :	Sangat Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi
--------------	---------------	--------	--------	---------------

D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

Tabel 3. 5
Pengendalian Yang Sudah Dilakukan

No	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang sudah ada
I	Risiko Strategis Pemerintah Daerah	
1	Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata antar waktu dan antar wilayah	Kegiatan PUPM, Fasilitasi Tunda Jual, TTI, Stabilitas Harga
2	Rendahnya kemampuan menyerap hasil panen petani	Kegiatan PUPM, LDPM, Pemberdayaan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dan lembaga usaha lainnya
3	Data tidak realtime	Pengembangan Aplikasi Sislogda, Kerjasama dengan oftaker, Penyusunan Regulasi, Pemberdayaan Lembaga Ekonomi
4	Tingginya ketergantungan konsumsi masyarakat terhadap padi-padian	Edukasi B2SA, OPP, Promosi Pangan Lokal, Fasilitasi alat pengolahan pangan lokal, Bintel pengolahan pangan lokal
II	Risiko Strategis Perangkat Daerah	
1	Tidak terdistribusikannya bahan pangan dari produsen kepada konsumen	Kegiatan PUPM, TTI, Fasilitasi Distribusi Pangan
2	Cadangan pangan tidak tersedia	Mengalokasikan anggaran untuk penambahan volume pengadaan cadangan pangan
3	Ketercapaian nilai komposisi pola pangan belum ideal pada seluruh kelompok pangan	Edukasi B2SA, OPP, Promosi Pangan Lokal, Fasilitasi alat pengolahan pangan lokal, Bintel pengolahan pangan lokal
4	Rendahnya angka konsumsi energi Jawa Tengah	Edukasi B2SA, OPP, Promosi Pangan Lokal, Fasilitasi alat pengolahan pangan lokal, Bintel pengolahan pangan lokal
5	Keterjangkauan penyebaran informasi B2SA rendah	Edukasi B2SA, OPP, Promosi Pangan Lokal, Fasilitasi alat pengolahan pangan lokal, Bintel pengolahan pangan lokal
6	PSAT mengandung cemaran	Pengawasan dan pembinaan
7	Kualitas PSAT yang beredar masih buruk	Pengawasan dan pembinaan
8	PSAT belum memiliki izin edar / nomor registrasi	Pengawasan dan pembinaan
9	Masyarakat mengkonsumsi pangan yang belum aman	Sosialisasi

No	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang sudah ada
III Risiko Operasional Perangkat Daerah		
1	Data komoditas pangan strategis yang dihasilkan kurang akurat	Koordinasi dengan Dinas teknis terkait dan Instansi Pangan Kabupaten/Kota
	Data harga pangan strategis kurang akurat	Koordinasi dan pembinaan kepada petugas enumerator
	Belum optimalnya intervensi harga pangan strategis	Koordinasi dengan stakeholders, kebijakan tebus harga
2	Aplikasi SISLOGDA error, belum running well	Koordinasi dengan OPD terkait, pengumpulan data dilakukan secara offline
3	Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola di bawah standar ketentuan yang berlaku	Peningkatan CPPD Prov, melalui penguatan kapasitas (gabah, SDM, sarpras)
	Tidak ada cadangan pangan di Lumbung Pangan Masyarakat	Fasilitasi, Pendampingan, Penguatan Kelembagaan
4	Agenda intervensi pengembangan pangan lokal tidak efektif	Verifikasi Calon Penerima, Monitoring dan Evaluasi
	Agenda Edukasi B2SA tidak efektif	Rapat penentuan sasaran edukasi
5	Bantuan OPP tidak efektif	Verifikasi Calon Penerima, Monitoring dan Evaluasi
6	Terbatasnya jumlah sampel PSAT yang diuji	Pengawasan PSAT di peredaran
	Metode pengambilan sampel tidak tepat	Pengawasan PSAT di peredaran
	Masyarakat tidak memahami keamanan dan mutu pangan, kemampuan masyarakat beragam	Sosialisasi
7	Kelompok / pelaku usaha tidak menerapkan higiene sanitasi	Pengawasan dan pembinaan kelompok/pelaku usaha
8	Keterbatasan layanan pengujian mutu pangan	Pelayanan Pendaftaran pengujian mutu secara online
	Keterbatasan sarana dan prasarana pengujian mutu pangan	Fasilitasi, laboratorium yang representatif
9	Keterbatasan layanan sertifikasi dan registrasi	Pelayanan Sertifikasi dan Registrasi secara OSS (online)
10	Data dasar Peta SKPG dan/atau FSVA yang dihasilkan kurang akurat	Koordinasi dengan Dinas teknis terkait dan Instansi Pangan Kabupaten/Kota
IV Risiko Penunjang Perangkat Daerah		
1	Tidak akuratnya penyajian data awal	Menyediakan formulir/isian data
	Tidak terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Menyediakan formulir/isian data
	Tidak akuratnya penyajian data awal penyusunan laporan dan verifikasi keuangan	Menyediakan formulir/isian data
2	1. Terjadinya kerusakan jaringan listrik dan komponen listrik 2. Kabel listrik dimakan tikus	Kabel-kabel yang ada diberikan tempat khusus
	Terhambatnya pekerjaan kantor	Mengoptimalkan fungsi peralatan/perlengkapan kantor yang ada untuk sementara
3	Terjadi kenaikan tarif penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Mengoptimalkan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang ada untuk sementara
	Terjadinya tidak kriminalitas dan kebersihan lingkungan terbengkalai	Mengoptimalkan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang ada untuk sementara
4	Gedung rusak, kebakaran, dan terdampak dari kejadian alam	Terjaminnya Barang Milik Daerah akibat bencana alam dan kecelakaan
	Barang milik daerah tidak terpantau keberadaan maupun kondisinya	Tertatanya Barang Milik Daerah
5	Perbaikan gedung kantor dilakukan saat jam kantor	Kenyamanan dan keindahan gedung kantor untuk menunjang kinerja ASN

No	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang sudah ada
	Kerusakan gedung semakin parah dan gedung tidak dapat digunakan	Mengoptimalkan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya yang ada untuk sementara

E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

1. Menghindari risiko (*avoid*)

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.

2. Mengubah/mengurangi kemungkinan munculnya risiko (*abate*)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*).

3. Mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko (*mitigate*)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/ mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan.

Abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (*reduce*).

4. Membagi risiko (*share*) atau mentransfer risiko

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan dan *joint ventures* untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka instansi yang mentransfer risiko mendapat risiko baru, yaitu instansi lain yang memperoleh transfer risiko tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif.

5. Menerima atau mempertahankan risiko (*accept/retain*)

Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut.

Dari pembahasan dalam tim maka ditetapkan pengendalian yang masih dibutuhkan tergambar sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. 6
Penilaian Atas Kegiatan Yang Ada dan Masih Dibutuhkan

No	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang dibangun untuk mengendalikan risiko	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
I Risiko Strategis Pemerintah Daerah				
1	Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata antar waktu dan antar wilayah	Sinergitas dengan Kab/Kota sehingga hasil panen dapat dijangkau seluruh Jateng Penyusunan Grand Design pengelolaan Hulu – Hilir Komoditas Pangan	Gubernur, Stakeholders terkait	2022
2	Rendahnya kemampuan menyerap hasil panen petani	Pembinaan dan pendampingan dari stakeholders terkait, pengembangan kemitraan	Gubernur, Stakeholders terkait	2022
3	Data tidak realtime	Penguatan lembaga pendukung SISLOGDA	Gubernur, Stakeholders terkait	2022
4	Tingginya ketergantungan konsumsi masyarakat terhadap padi-padian	Pembentukan Tim Pokja Pengembangan Pangan Lokal yang beranggotakan perangkat daerah terkait dan OPD Kabupaten/Kota yang menangani urusan pangan	Gubernur/Stakeholders terkait	2022
II Risiko Strategis Perangkat Daerah				
1	Tidak terdistribusikannya bahan pangan dari produsen kepada konsumen	Sinergitas dengan Kab/Kota sehingga hasil panen dapat didistribusikan kepada konsumen sampai dengan lintas wilayah	Kepala Dinas	2022
2	Cadangan pangan tidak tersedia	Pengajuan tambahan anggaran, sinergitas dengan Kabupaten/Kota sehingga dapat tersedia cadangan pangan di Kab/Kota	Kepala Dinas	
3	Ketercapaian nilai komposisi pola pangan belum ideal pada seluruh kelompok pangan	Melakukan pemetaan secara holistik dan integratif bersama dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Kepala Dinas	2023
4	Rendahnya angka konsumsi energi Jawa Tengah	Optimalisasi pemanfaatan SISLOGDA dalam penyampaian informasi ketersediaan dan harga pangan lokal di Jawa Tengah	Kepala Dinas	2023
5	Keterjangkauan penyebaran informasi B2SA rendah	Koordinasi intensif dengan Distanbun, DIsnakeswan, Dinluthan, Dinkopumkm, Diskominfo, Disperindag, Dispermasdesdukcapil terkait perumusan strategi intervensi pengembangan pangan lokal	Kepala Dinas	2023
6	PSAT mengandung cemaran	Peningkatan kapasitas pengawasan melalui pelatihan pengawas secara online	Kepala Dinas	TW 4
7	Kualitas PSAT yang beredar masih buruk	Pelatihan petugas pembina dengan materi pengujian mutu beras	Kepala Dinas	TW 1
		Pengawasan kewajiban pencantuman mutu beras pada label kemasan	Kepala Dinas	TW 2, TW 3
8	PAST belum memiliki izin edar/nomor registrasi	Peningkatan kapasitas pengawas melalui pelatihan pengawas secara online	Kepala Dinas	TW 4
		Sosialisasi kepada pelaku usaha melalui leaflet berjudul “registrasi PSAT PDUK”, postingan informasi keamanan pangan di media sosial Instagram Dishanpan Jateng	Kepala Dinas	TW 1
9	Masyarakat mengkonsumsi	Sosialisasi kepada masyarakat	Kepala Dinas	Februari : 2

No	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang dibangun untuk mengendalikan risiko	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
	pangan yang belum aman	melalui pertemuan pengenalan pangan mana bermutu 5 kali		Maret : 2 Juni : 1
		Sosialisasi kepada masyarakat melalui leaflet, media audio, audio visual media sosial : postingan informasi keamanan pangan di media sosial Instagram Dishanpan Jateng	Kepala Dinas	Leaflet : TW 4 Audio Visual : TW 3 Instagram : Setiap Bulan
III Risiko Operasional Perangkat Daerah				
1	Data komoditas pangan strategis yang dihasilkan kurang akurat	Melakukan bimbingan teknis metode penghitungan penyusunan NBM dan NPS	Kepala Dinas	2022
	Data harga pangan strategis kurang akurat	Peningkatan kapasitas SDM, pemntaun kinerja secara berkala	Ka. Bid. Distribusi dan Cadangan Pangan	2022
	Belum optimalnya intervensi harga pangan strategis	Dibentuk Tim Intervensi Harga	Ka. Bid. Distribusi dan Cadangan Pangan	2022
2	Aplikasi SISLOGDA error, belum running well	Pemutakhiran data secara berkala	Ka. Bid. Distribusi dan Cadangan Pangan	
3	Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola di bawah standar ketentuan yang berlaku	Pengadaan CPP sesuai dengan ketersediaan anggaran, perbaikan sarpras	Kepala Dinas	2022
	Tidak ada cadangan pangan di Lumbung Pangan Masyarakat	Pembinaan dan Pendampingan Kelompok baik dalam hal teknis maupun administratif	Kepala Dinas	2022
4	Agenda Intervensi pengembangan pangan lokal tidak efektif	Penyusunan Roadmap Pengembangan Pangan Lokal Jawa Tengah	Kepala Dinas	2023
	Agenda Edukasi B2SA tidak efektif	Sinkronisasi Agenda Penanganan Stunting dalam Roadmap Pengembangan Pangan Lokal	Kepala Dinas	2023
5	Bantuan OPP tidak efektif	Pengalokasian honorarium kepada pendamping lapangan/penyuluh yang lebih memadai dalam rangka pembinaan/pemberdayaan masyarakat penerima OPP	Kepala Dinas	2023
6	Terbatasnya jumlah sampel PSAT yang teruji	Pengambilan sampel dengan metode <i>multistage random sampling</i> agar dapat merepresentasikan kondisi di Jawa Tengah	Ka. Bid. Keamanan Pangan	TW 1
	Metode pengambilan sampel tidak tepat	Pelatihan Petugas Pengambil Contoh secara Online	Ka. Bid. Keamanan Pangan	TW 1
	Masyarakat tidak memahami keamanan dan mutu pangan, kemampuan masyarakat beragam	Sosialisasi kepada masyarakat melalui pertemuan pengenalan pangan aman bermutu 5 kali	Ka. Bid. Keamanan Pangan	Februari : 2 Maret : 2 Juni : 1
		Sosialisasi kepada masyarakat melalui leaflet, media audio, audio visual media sosial : postingan informasi keamanan pangan di media sosial instagram Dishanpan Jateng	Ka. Bid. Keamanan Pangan	Leaflet : TW 4 Audio Visual : TW 3 Instagram : Setiap Bulan
7	Kelompok/pelaku usaha tidak menerapkan higiene sanitasi	Sosialisasi kepada pelaku usaha, pelatihan higiene sanitasi kepada pelaku usaha, pembinaan higiene sanitasi kepada pelaku usaha	Ka. Bid. Keamanan Pangan	Pelatihan Higiene Sanitasi TW 2, Sosialisasi Pelaku Usaha TW 4
8	Keterbatasan layanan pengujian mutu pangan	Menambah ruang lingkup akreditasi pengujian dan sarana prasarana pengujian	Kepala BPMKP	TW 1 s.d. TW 4
	Keterbatasan sarana dan prasarana pengujian mutu pangan	Optimalisasi peralatan pengujian dan penambahan peralatan sesuai ruang lingkup yang terakreditasi KAN	Kepala BPMKP	TW 4
9	Keterbatasan layanan sertifikasi dan registrasi	Pelatihan SDM kerja sama dengan pihak II	Kepala BPMKP	TW 1 s.d. TW 4
10	Data dasar Peta SKPG dan/atau FSVA yang dihasilkan kurang akurat	Bimtek Penyusunan SKPG dan/atau FSVA	Ka. Bid. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Agustus Minggu ke IV 2022
IV Risiko Penunjang Perangkat Daerah				
1	Tidak akuratnya penyajian data awal	Menganalisis data yang telah tersaji untuk dijadikan data yang valid	Ka. Keuangan Subbag.	2022
	Tidak terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan	Menganalisis data yang telah tersaji untuk dijadikan data yang valid	Ka. Keuangan Subbag.	2022
	Tidak akuratnya penyajian data awal penyusunan laporan dan verifikasi	Menganalisis data yang telah tersaji untuk dijadikan data yang valid	Ka. Keuangan Subbag.	2022

No	Pernyataan Risiko	Pengendalian yang dibangun untuk mengendalikan risiko	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
2	1. Terjadinya kerusakan jaringan listrik dan komponen listrik 2. Kabel listrik dimakan tikus	Menganggarkan untuk pembelian tempat khusus kabel-kabel	Ka. Subbag. Umum dan Kepegawaian	Menyesuaikan jadwal perubahan anggaran
	Terhambatnya pekerjaan kantor	Mengusulkan tambahan anggaran pada perubahan anggaran	Ka. Subbag. TU BPMKP	Menyesuaikan jadwal perubahan anggaran
3	Terjadi kenaikan tarif penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun berikutnya	Ka. Subbag. TU BPMKP	2023
	Terjadinya tidak kriminalitas dan kebersihan lingkungan terbengkalai	Mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun berikutnya	Ka. Subbag. TU BPMKP	2023
4	Gedung rusak, kebakaran, dan terdampak dari kejadian alam	Harus ada anggaran dan jaminan baik gedung kantor maupun kendaraan dinas	Ka. Subbag. Umum dan Kepegawaian	2022
	Barang milik daerah tidak terpantau keberadaan maupun kondisinya	Mengoptimalkan penatausahaan Barang Milik Daerah dengan penambahan anggaran	Ka. Subbag. Umum dan Kepegawaian	Pada bulan Maret 2022
5	Perbaikan gedung kantor dilakukan saat jam kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor sehingga tujuan organisasi dapat tercapai	Ka. Subbag. Umum dan Kepegawaian	2022
	Kerusakan gedung semakin parah dan gedung tidak dapat digunakan	Mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun berikutnya	Ka. Subbag. TU BPMKP	2023

BAB IV

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Oleh karena itu tim menentukan Rancangan Informasi dan Komunikasi sebagai berikut :

Tabel 4. 1

Rancangan Informasi dan Komunikasi

No	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan (Tgl, Bln)	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	H
I Risiko Strategis Pemerintah Daerah							
1	Sinergitas dengan Kab/Kota sehingga hasil panen dapat dijangkau seluruh jateng	Surat/Surat Edaran	Dishanpan	Dinas Kab/Kota	Februari 2022	Februari 2022	Sinkronisasi Operasional Pelaksanaan Kegiatan Distribusi Pangan
2	Penyusunan Grand Design pengelolaan Hulu – Hilir Komoditas Pangan	Nota Dinas	Dinas terkait sektor pertanian	Sekda, Biro ISDA, BAPPEDA	Juni 2022		
3	Penguatan kelembagaan pemberdayaan menjadi kelembagaan ekonomi petani	Surat	Dishanpan	BAPPEDA, Dinas terkait, Kab/Kota	12 Bulan		
4	Pembinaan dan pendampingan dari stakeholders terkait, pengembangan kemitraan	Nota dinas/surat tugas/surat	Dishanpan, Biro Hukum, Dinas Kominfo	Masyarakat, Asosiasi, Pemda (stakeholders terkait)	12 Bulan		
5	Pembentukan Tim Pokja Pengembangan Pangan Lokal yang beranggotakan perangkat daerah terkait dan OPD Kabupaten/Kota yang menangani urusan pangan	Surat Edaran Gubernur	Dishanpan, Biro Hukum	OPD terkait di Provinsi dan Kabupaten / Kota	November 2023		
II Risiko Strategis Perangkat Daerah							
1	Sinergitas dengan Kab/Kota sehingga hasil panen dapat didistribusikan kepada konsumen sampai dengan lintas wilayah	Surat Kepala Dinas	DISHANPAN	Dinas Kabupaten/Kota	April 2022		
2	Pengajuan tambahan anggaran, sinergitas dengan kabupaten/kota sehingga dapat tersedia cadangan pangan di Kab/Kota	Nota Dinas/Surat Kepala Dinas	DISHANPAN	BAPPEDA Prov. Jateng, Dinas Kabupaten/Kota	April 2022		
3	Melakukan pemetaan secara holistik dan integratif bersama Dinas	Surat Kepala Dinas	DISHANPAN	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	November 2022		

No	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan (Tgl, Bln)	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	H
	Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah						
4	Optimalisasi pemanfaatan SISLOGDA dalam penyampaian informasi ketersediaan dan harga pangan lokal di Jawa Tengah	Surat Kepala Dinas	DISHANPAN	OPD terkait	November 2022		
5	Koordinasi intensif dengan Distanbun, Disnakeswan, Dinluthan, Dinkopumkm, Diskominfo, Disperindag, Dispermasdesdukcapil terkait perumusan strategi intervensi pengembangan pangan lokasi	Surat Kepala Dinas	DISHANPAN	Distanbun, Disnakeswan, Dinkopumkm, Diskominfo, Disperindag, Dispermasdesdukc apil	November 2022		
6	Peningkatan kapasitas pengawas melalui pelatihan pengawas secara online	Surat Undangan	DISHANPAN	Pelaku Usaha, Petugas dan Masyarakat	TW 4		
7	Pelatihan petugas pembina dengan materi pengujian mutu beras	Surat Undangan	DISHANPAN	Pelaku Usaha, Petugas dan Masyarakat	TW 1,TW 2, TW 3		
	Pengawasan kewajiban pencantuman mutu beras pada label kemasan						
8	Peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan pengawas secara online	Surat Undangan, Leaflet, Instagram	DISHANPAN	Pelaku Usaha, Petugas	TW 1, TW 4		
	Sosialisasi kepada pelaku usaha melalui leaflet berjudul "registrasi PSAT PDUK", postingan informasi keamanan pangan di media sosial instagram Dishanpan Jateng						
9	Sosialisasi kepada masyarakat melalui pertemuan pengenalan pangan aman bermutu 5 kali	Surat Undangan, Leaflet, Instagram	DISHANPAN	Masyarakat	Februari : 2 Maret : 2 Juni : 1		
	Sosialisasi kepada masyarakat melalui leaflet, media audio, audio visual media sosial : postingan informasi keamanan pangan di media sosial instagram Dishanpan Jateng				Leaflet : TW 4 Audio Visual : TW 3 Instagram : Setiap bulan		
II I	Risiko Operasional Perangkat Daerah						
1	Melakukan bimbingan teknis metode penghitungan penyusunan NBM dan	Surat/SK/Nota Dinas/Aplikasi	Distanbun, Disnakeswan, DKP, Disperindag,	Instansi Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota	Juni 2022		

No	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan (Tgl, Bln)	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	H
	NPS		Bulog, BPS, Balai Karantina Pertanian, Dinas pangan Kabupaten/Kota				
	Peningkatan kapasitas petugas, pemantauan kinerja secara berkala	Surat/WAG	BAPANAS, Dishanpan	BAPANAS, petugas enumerator Kabupaten/Kota	Maret s.d. Desember 2022		
	Dibentuk Tim Intervensi Harga	Surat/SK	Dinas Terkait	Dinas Terkait	Juli 2022		
2	Pemutakhiran data secara berkala	Surat, Rapat koordinasi, SK Gubernur, Peraturan Gubernur Jawa Tengah	Dinas teknis terkait: Distanbun, Disnakeswan, DKP, Disperindag, BPS, Badan Karantina	Dinas Ketahanan pangan	12 Bulan		
	Mengawal pembentukan lembaga usaha untuk menyerap produk petani	Surat, rapat koordinasi	Dishanpan, Dinas Kab/Kota	Dinas Ketahanan Pangan	12 Bulan		
	Peningkatan sarpras dan publikasi TTIC, meningkatkan kemitraan	Nota Dinas/Surat/Med sos	DISHANPAN	Masyarakat Konsumen	Mei 2022		
3	1. Menambah jumlah pelatihan 2. Memberikan stimulan peralatan pendukung usaha distribusi pangan	Surat, rapat koordinasi, Bimtek	OPD terkait di Kabupaten/Kota, masyarakat penerima	Dinas Ketahanan Pangan	12 Bulan		
4	Pengadaan CPP sesuai dengan ketersediaan anggaran, perbaikan sarpras	Surat, Koordinasi, website	DISHANPAN	Dinas terkait, Dinas Kab/Kota	Oktober 2022		
	Pembinaan dan Pendampingan Kelompok baik dalam hal teknis maupun administrasi	Surat, Bimtek, Koordinasi, Pendampingan	DISHANPAN	Dinas terkait, Dinas Kab/Kota, pengelola Lumbung Pangan Masyarakat	Maret – Desember 2022		
5	Penyusunan Roadmap Pengembangan Pangan Lokal Jawa Tengah	Peraturan Gubernur/Surat Keputusan Gubernur/Surat Edaran Kepala Dinas	Dishanpan, Biro Hukum	OPD terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota	November 2023		
	Sinkronisasi Agenda Penanganan Stunting dalam Roadmap pengembangan pangan lokal	Peraturan Gubernur/Surat Keputusan Gubernur/Surat Edaran Kepala Dinas	Dishanpan, Biro Hukum	OPD terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota	November 2023		
	Pengalokasian honorarium kepada pendamping lapangan/penyuluh yang lebih memadai dalam rangka pembinaan/pemberdayaan masyarakat penerima OPP	Pergub Rincian APBD	TAPD	Dishanpan	Desember 2022		
6	Pengambilan sampel dengan metode <i>multistage random</i>	Surat Undangan	Bidang Keamanan	Petugas Teknis, Dinas Pelaku	TW 1		

No	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan (Tgl, Bln)	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	H
	sampling agar dapat merepresentasikan kondisi di Jawa Tengah		Pangan	Usaha			
	Pelatihan Petugas Pengambil Contoh secara Online	Pedoman teknis pengambilan sampel	Bidang Keamanan Pangan	Petugas dinas usaha	TW 1		
	Sosialisasi kepada masyarakat melalui pertemuan pengenalan pangan aman bermutu 5 kali	Surat Undangan, Leaflet, Instagram	Bidang Keamanan Pangan	Masyarakat	TW 1, TW 3, TW 4		
	Sosialisasi kepada pelaku usaha, pelatihan higiene sanitasi kepada pelaku usaha, pembinaan higiene sanitasi kepada pelaku usaha	Surat Undangan	Bidang Keamanan Pangan	Pelaku Usaha	TW 2, TW 4		
	Menambah ruang lingkup akreditasi pengujian dan sarana prasarana pengujian	Surat Tugas/Nota Dinas	BPMKP	Pelaku usaha	2023		
	Optimalisasi peralatan pengujian dan penambahan peralatan sesuai ruang lingkup yang terakreditasi KAN	Surat Tugas/Nota Dinas	BPMKP	Pelaku Usaha	2023		
	Pelatihan SDM kerjasama dengan pihak II	Surat Tugas/Nota Dinas	BPMKP	OPD Provinsi terkait/OPD Kab/Kota/LSO	TW II, TW III, TW IV		
	Bimtek SDM Penyusunan dan/atau FSVA	Surat/Surat Edaran/Web	Tim Penyusun SKPG dan/atau FSVA dan Kab/Kota	Dinas Kabupaten dan Masyarakat Jawa Tengah	2023		
IV Risiko Penunjang Perangkat Daerah							
1	Menganalisa data yang telah tersaji untuk dijadikan data yang valid	Surat/Nota Dinas	Dishanpan Prov. Jateng	Bidang dan Sekretariat	2021	Januari s.d. Desember 2021	
2	Penyusunan jadwal pemeliharaan perlengkapan gedung kantor dan mengoptimalkan petugas service	Surat/Form Permintaan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung	Dishanpan Prov. Jateng	Petugas service perlengkapan gedung kantor	Januari s.d. Desember 2021	Januari s.d. Desember 2021	Menyesuaikan dengan kerusakan perlengkapan gedung kantor/untuk service dilakukan rutin
3	Penyusunan jadwal service kendaraan dinas secara berkala dan mengoptimalkan petugas service	Surat/Form Permintaan Service/Penggantian Suku Cadang Kendaraan	Dishanpan Prov. Jateng	Dishanpan Prov. Jateng	Januari s.d. Desember 2021	Januari s.d. Desember 2021	Menyesuaikan dengan kerusakan perlengkapan Kendaraan Dinas/untuk service dilakukan rutin
4	Memasukkan segala risiko pada pengadaan polis asuransi tahun 2021	Surat	Dishanpan Prov. Jateng	Pihak Penjamin BMD (Asuransi)	Oktober 2021	Oktober 2021	Menyesuaikan jadwal pengadaan polis asuransi
5	Mengusulkan pengadaan kembali pada perubahan	Nota dinas usulan perubahan	Dishanpan Prov. Jateng	Dishanpan Prov. Jateng			Menyesuaikan jadwal perubahan

No	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan (Tgl, Bln)	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	H
	anggaran	anggaran					anggaran
6	Mengusulkan pengadaan kembali pada perubahan anggaran	Nota dinas usulan perubahan anggaran	BPMKP Dishanpan Prov Jateng	Dishanpan Prov Jateng	Januari s.d. Desember 2022	Januari s.d. Desember 2022	Menyesuaikan jadwal perubahan anggaran
7	Mengusulkan pengadaan kembali pada perubahan anggaran	Nota dinas usulan perubahan anggaran	BPMKP Dishanpan Prov Jateng	Dishanpan Prov Jateng	Januari s.d. Desember 2022	Januari s.d. Desember 2022	April s.d. Desember 2022
8	Mengusulkan pengadaan kembali pada perubahan anggaran	Nota dinas usulan perubahan anggaran	BPMKP Dishanpan Prov Jateng	Dishanpan Prov Jateng	Januari s.d. Desember 2022	Januari s.d. Desember 2022	2023
9	Menganalisa data yang telah tersaji untuk dijadikan data yang valid	Surat/Nota Dinas	Dishanpan Prov. Jateng	Bidang Sekretariat dan	2022	Januari s.d. Desember 2022	

BAB V
RANCANGAN PEMANTAUAN

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif.

Pemantauan dan Evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan Evaluasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

Tabel 5. 1
Rancangan Pemantauan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis Pemerintah Daerah					
1	Sinergitas dengan Kab/Kota sehingga hasil panen dapat dijangkau seluruh jateng	Surat/Surat Edaran/Web	Kepala Dinas	12 Bulan		
2	Penyusunan Grand Design pengelolaan Hulu – Hilir Komoditas Pangan	Nota Dinas	Kepala Dinas	Juni 2022		
3	Penguatan kelembagaan pemberdayaan menjadi kelembagaan ekonomi petani	Surat/Surat Edaran/Web	Kepala Dinas	12 Bulan		
	Pembinaan dan pendampingan dari stakeholders terkait, pengembangan kemitraan	Nota dinas/Surat Tugas/Surat Edaran/SK/Web	Kepala Dinas	12 Bulan		
	Pembentukan Tim Pokja Pengembangan Pangan Lokal yang beranggotakan perangkat daerah terkait dan OPD Kabupaten/Kota yang menangani urusan pangan	Surat Edaran Gubernur	Gubernur	November 2022		
II	Risiko Strategis Perangkat Daerah					
1	Sinergitas dengan Kab/Kota sehingga hasil panen dapat	Surat Kepala Dinas	Kepala Dinas	April 2022		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
	didistribusikan kepada konsumen sampai dengan lintas wilayah					
2	Pengajuan tambahan anggaran, sinergitas dengan Kabupten/Kota sehingga dapat tersedia cadangan pangan di Kab/Kota	Nota Dinas/Surat Kepala Dinas	Kepala Dinas	April 2022		
3	Melakukan pemetaan secara holistik dan integratif bersama dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Surat/Surat Edaran/Web	Kepala Dinas	November 2023		
4	Optimalisasi pemanfaatan SISLOGDA dalam penyampaian informasi ketersediaan dan harga pangan lokal di Jawa Tengah	Nota dinas/Surat Tugas/ Surat Edaran/SK/Web	Kepala Dinas	November 2023		
5	Koordinasi intensif dengan Distanbun, Disnakeswan, Dinluthan, Dinkopumkm, Diskominfo, Disperindag, Dispermasdesdukcapil terkait perumusan strategi intervensi pengembangan pangan lokal	Surat/Surat Edaran/Web	Kepala Dinas	Desember 2022		
III Risiko Operasional Perangkat Daerah						
1	Melakukan bimbingan teknis metode penghitungan penyusunan NBM dan NPS	Surat/SK/Nota Dinas/Aplikasi	Kepala Dinas	Juni 2022		
	Peningkatan kapasitas petugas, pemantauan kinerja secara berkala	Surat, rapat koordinasi	Kepala Dinas	12 Bulan		
	Dibentuk Tim Intervensi Harga	Surat, Rapat Koordinasi	Kepala Dinas	12 Bulan		
2	Pemutakhiran data secara berkala	Surat, Rapat Koordinasi, SK Gubernur, Peraturan Gubernur Jawa Tengah	Kepala Dinas	12 Bulan		
	Mengawal pembentukan lembaga usaha untuk menyerap produk petani	Surat, Rapat Koordinasi	Kepala Dinas	12 Bulan		
	Peningkatan sarpras dan publikasi TTIC, meningkatkan kemitraan	Nota Dinas/Surat Kepala Dinas/Medsos	Kepala Bidang	Mei 2022		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
3	1. Menambah jumlah pelatihan 2. Memberikan stimulan peralatan pendukung usaha distribusi pangan	Surat, Rapat Koordinasi	OPD terkait di Kabupaten/Kota	12 Bulan		
4	Pengadaan CPP sesuai dengan ketersediaan anggaran, perbaikan sarpras	Surat, Koordinasi, Website	Kepala Dinas	12 Bulan		
	Pembinaan dan Pendampingan Kelompok baik dalam hal teknis maupun administrasi	Surat, Bimtek, koordinasi, pendampingan	Kepala Dinas	12 Bulan		
5	Penyusunan Roadmap Pengembangan Pangan Lokal Jawa Tengah	Surat/Surat Edaran/Web	Kepala Dinas	November 2023		
	Sinkronisasi Agenda Penanganan Stunting dalam Roadmap Pengembangan Pangan Lokal	Nota Dinas/Surat Tugas/Surat Edaran/SK/Web	Kepala Dinas	November 2023		
6	Pengalokasian honorarium kepada pendamping lapangan/penyuluh yang lebih memadai dalam rangka pembinaan/pemberdayaan masyarakat penerima OPP	Surat/Surat Edaran/Web	Kepala Dinas	Desember 2022		
7	Pengambilan sampel dengan metode multistage randomg sampling agar dapat merepresentasikan kondisi di Jawa Tengah	Surat	Kepala Dinas	12 Bulan		
	Pelatihan Petugas Pengambil Contoh secara Online	Surat	Kepala Dinas	Maret		
	Sosialisasi kepada masyarakat melalui pertemuan pengenalan pangan aman bermutu 5 kali	Surat	Kepala Dinas	Maret, Juni		
	Sosialisasi kepada pelaku usaha, pelatihan higiene sanitasi kepada pelaku usaha, pembinaan higiene sanitasi kepada pelaku usaha	Surat	Kepala Dinas	September 2022		
	Menambah ruang lingkup akreditasi pengujian dan	Nota Dinas/Surat Tugas	Kepala Dinas	12 Bulan		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
	sarana prasarana pengujian					
	Optimalisasi peralatan pengujian dan penambahan peralatan sesuai ruang lingkup yang terakreditasi KAN	Nota Dinas/Surat Tugas	Kepala Dinas	12 Bulan		
	Pelatihan SDM kerjasama dengan pihak II	Nota Dinas/Surat Tugas/Web	Kepala Dinas	12 Bulan		
8	Bimtek SDM Penyusunan SKPG dan/atau FSVA	Surat/Surat Edaran/Web	Kepala Dinas	Juli 2022		
IV Risiko Penunjang Perangkat Daerah						
1	Menganalisis data yang telah tersaji untuk dijadikan data yang valid	Surat/Nota Dinas	Kepala Dinas	Januari s.d. Desember 2022		
	Menganalisis data yang telah tersaji untuk dijadikan data yang valid	Surat/Form Permintaan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung	Kepala Dinas	Januari s.d. Desember 2022		
	Penyusunan jadwal service kendaraan dinas secara berkala dan mengoptimalkan petugas service	Surat/Form Permintaan Service/Penggantian Suku Cadang Kendaraan	Kepala Dinas	Januari s.d. Desember 2022		
2	Memasukkan segala risiko pada pengadaan polis asuransi tahun 2022	Surat	Kepala Dinas	Oktober 2022		
	Mengusulkan pengadaan kembali pada perubahan anggaran	Nota dinas usulan perubahan anggaran	Kepala Dinas	Januari s.d. Desember 2022		
3	Mengusulkan pengadaan kembali pada perubahan anggaran	Nota dinas usulan perubahan anggaran	Kepala Dinas	Januari s.d. Desember 2022		
	Mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun berikutnya	Nota dinas usulan perubahan anggaran	Kepala Dinas	Januari s.d. Desember 2022		
4	Mengusulkan pengadaan kembali pada perubahan anggaran	Nota dinas usulan perubahan anggaran	Kepala Dinas	Januari s.d. Desember 2022		
	Mengoptimalkan penatausahaan Barang Milik Daerah dengan penambahan anggaran	Surat/Nota Dinas	Kepala Dinas	Januari s.d. Desember 2022		
5	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Surat/Nota Dinas	Kepala Dinas	Januari s.d. Desember 2022		
	Mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun berikutnya	Nota dinas usulan perubahan anggaran	Kepala Dinas	Januari s.d. Desember 2022		

BAB VI PENUTUP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang berkelanjutan, menekankan pada soft control, dan keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh karakteristik sumber daya manusia. Efektivitas pengembangan lingkungan pengendalian sangat bergantung pada keberhasilan penegakan integritas dan etika, serta adanya komitmen dan teladan dari pimpinan tertinggi untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif. Demikian juga efektivitas identifikasi risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, sangat dipengaruhi oleh pertimbangan, judgement, dan komitmen dari seluruh personil dalam organisasi.

Selanjutnya Rencana Tindak Pengendalian (RTP) disusun sebagai tindak lanjut Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan uraian tentang bagaimana instansi pemerintah diharapkan dapat mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko. Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.